



Hk. 04. 01 / 249

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

NOMOR: KEP. 217 /M.PPN/12/2004

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP-3)/
THIRD URBAN POVERTY PROJECT (UPP-III)
DENGAN WORLD BANK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang: a. bahwa untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan sesuai permintaan Pemerintah Kota/Kabupaten, diperlukan adanya perluasan cakupan wilayah penanganan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) pada 15 (lima belas) propinsi yang belum terjangkau pada P2KP-1 dan P2KP-2;
- b. bahwa mengingat besarnya kebutuhan dana untuk pelaksanaan program tersebut dan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Indonesia diperlukan dukungan dan pinjaman luar negeri dari World Bank;
- c. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan World Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP-3) / *THIRD URBAN POVERTY PROJECT (UPP-3)* DENGAN PIHAK WORLD BANK.

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi P2KP-3 / UPP-3 dengan World Bank pada tanggal Desember 2004 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA: Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam

Country Portfolio Performance Review (CPPR)
khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.

3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Tatag Wiranto
Deputi Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Sjarifuddin Akil
Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman,
Ex Departemen Kimpraswil. Sebagai Wakil Ketua
3. Prasetijono Widjojo, MJ
Deputi Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Mulia P. Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
5. Achmad Rochjadi
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
6. Seman Widjoyo
Direktur Jenderal Bina Bangda,
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Joharis Lubis
Deputi VI Menko Kesra,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
8. Penny Lukito-Firdaus
Direktur Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
9. Delthy S. Simatupang
Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 10. | Agus Jarot Hadikustanto Direktur Bina Teknik, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Eks Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 11. | Dharma Bakti Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 12. | Adriansyah Direktur Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah, Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 13. | Maurin Sitorus Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 14. | Haryo Sasongko Direktur Perkotaan, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 15. | Tjindra Parma W Kepala Biro Hukum, Eks Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Penny Lukito-Firdaus Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Ketua |
| 2. | Agus Jarot Hadikustanto Direktur Bina Teknik, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Eks Departemen Kimpraswil. | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. | Fuadi Asdep Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Urusan Pemberdayaan Manusia & Lingkungan SD UKMK, Kantor Menko Kesra. | Sebagai Anggota |

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 4. | Haryo Raharjo Kasubdit Kawasan Perdesaan dan Agropolitan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 5. | Rinella Tambunan Kasubdit Kawasan Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 6. | Obrian Saragih Kasubdit Multilateral II, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 7. | Baharuddin Kasubdit Pinjaman Daerah, Direktorat Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah, Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 8. | Hermany Noor Kasubdit PHLN I, Direktorat PPHLN, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 9. | Indrati Iswari Kasubdit Kawasan Kumuh, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 10. | Danny Sutjiono Kasubdit Perencanaan & Penganggaran, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 11. | Agus Sumargiaro Kabag Hukum, Seditjen Perumahan dan Permukiman, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 12. | Arianto Pimpro P2KP, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 13. | Rudi S. Prawiradinata Kasi Kebijakan Kawasan Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 14. | Teni Widuriyanti Kasi Asian Development Bank Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 15. | Agustin Arry Yanna Kasi World Bank Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 16. | Subekti Kasi PHLN IB, Direktorat PPHLN, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 17. | Dewi Chomistriana Kasi PJMP, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 18. | Suprayitno Kasi Perencanaan dan Perancangan Kawasan Kumuh Perkotaan, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 19. | Aswin Grandiarso Staff Direktorat Bina Teknik, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 20. | Bobby Ali Azhari Staff Direktorat Bina Teknik, Ditjen Perumahan dan Permukiman, Ex. Departemen Kimpraswil. | Sebagai Anggota |
| 21. | Effendi Siahaan Staff Direktorat PPHLN, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |

- KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi P2KP-3 / UPP-3 tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi P2KP-3 / UPP-3 tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Permukiman dan Perumahan, Eks Departemen Kimpraswil.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2004

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
2. Sdr. Menteri Keuangan
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
5. Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.